PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN KESEHATAN**

UNIT KERJA : **DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MARIA ENDANG SUMIWI**
2. Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL**
3. NHK : **886537**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 2.575.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 196 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
2. Tanah Seluas 33 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 1.197 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 2.208 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 490 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
6. Tanah Seluas 634 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
7. Tanah Seluas 604 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 198.000.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOBIL, KIA PICANTO MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

3. MOBIL, SUZUKI IGNIS MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. MOTOR, YAMAHA MIO SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**60.750.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**4.894.647.198**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**293.250.650**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**264.161.137**
	Sub Total	**Rp.**	**8.285.808.985**
III. HUTANG		**Rp.**	**----**
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		**Rp.**	**8.285.808.985**

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.